



Planning FKUB Dalam Mewujudkan Kerukunan Ummat Pasca Konflik Keagamaan Di Kota Tanjung Balai Tahun 2016

^{1*Muhammad Surya; ^{2Erwan Efendi}}

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

¹suryao104212059@uinsu.ac.id; erwanefendi@uinsu.ac.id

*Penulis koresponden

Diajukan: 13-05-2025

Diterima: 25-06-2025

ABSTRACT: This research qualitative explains the role of the Forum for Religious Harmony (FKUB) planning in building religious harmony in Tanjung Balai City after the 2016 conflict. Data collection through interviews, participant observation, and documentation. The results show that FKUB's planning includes increasing consolidation and partnership dialogue between religious communities, periodic coordination with local government in socialization of religious harmony. Efforts for moderation religion are also demonstrated through the development of an integrative religious tourism area of six places of worship from various religions. FKUB Tanjung Balai serves as a communication mediator between religious communities, organizes joint activities, and conducts socialization to enhance tolerance. Tanjung Balai's status as an intolerant city has changed into a model for religious harmony. Systematic and participatory FKUB planning is the key to building tolerance and harmony between religious communities.

KEYWORDS: planning, harmony, tolerance, Tanjung Balai.

ABSTRAK: Penelitian kualitatif ini menjelaskan peran perencanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun kerukunan umat beragama di Kota Tanjung Balai pasca konflik 2016. pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa planning FKUB meliputi peningkatan konsolidasi dan dialog kemitraan antar umat beragama, koordinasi berkala dengan pemerintah daerah dalam sosialisasi kerukunan dan toleransi beragama. Upaya moderasi dalam beragama berupa pengembangan kawasan wisata religi integratif dari enam rumah ibadah dari berbagai agama. FKUB Tanjung Balai menjalankan peran sebagai mediator komunikasi antar umat, bahkan mengadakan kegiatan bersama. Status Tanjung Balai sebagai kota intoleran telah berubah jadi percontohan kerukunan umat beragama. Planning FKUB yang sistematis dan partisipatif itu menjadi kunci pembangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

KATA KUNCI: planning, kerukunan, toleransi, Tanjung Balai

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial, tentunya mereka dituntut untuk selalu mampu berinteraksi dengan individu lain. Dalam menjalani kehidupan sosialnya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya akan terjadi konflik antara mereka baik berkaitan dengan ras maupun kepercayaan agama.¹ Indonesia di kenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan keanekaragaman agama. Contoh nyata dari beragaman tersebut terdiri dari berbagai latar belakang agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Konghucu dan Buddha yang hidup berdampingan. Meski demikian, perbedaan ini kadang memunculkan tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Konflik dan mispersepsi antar umat beragama masih bisa terjadi, yang berpotensi menggangu stabilitas sosial.

Sumatera Utara dikenal sebagai provinsi dengan keragaman agama yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, mayoritas penduduk menganut agama Islam sebesar 62,77%, diikuti oleh Kristen 34,36%, Buddha 2,58%, Konghucu 0,18%, dan Hindu 0,11% (I-KHub, 2025). Keberagaman ini tentu menjadi kekayaan tersendiri, namun juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dibarengi dengan sikap saling menghargai dan toleransi. Perbedaan dalam tradisi, ibadah, hingga pelaksanaan hari besar agama kerap menjadi pemicu perselisihan jika tidak dikelola secara bijak. Oleh karena itu, interaksi sosial antar pemuka agama dan tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan, sebagaimana yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Tanjungbalai.²

Meski demikian, konflik antarumat beragama pernah terjadi di Kota Tanjungbalai pada tahun 2016. Insiden ini bermula dari protes seorang perempuan keturunan Tionghoa yang tinggal di depan Masjid Al Maksum, Jalan Karya, yang merasa volume suara adzan terlalu keras. Protes tersebut memicu kemarahan sejumlah warga dan akhirnya berkembang menjadi

¹ Ujang Mahadi, *Komunikasi Antarbudaya (1st Ed.)* (Pustaka Pelajar, 2017).

² IKHUB, 'Sekilas Sumatera Utara', *I-KHub BNPT on CT/VE - Pusat Informasi Dan Kolaborasi Penanggulangan Terorisme Dan Ekstremisme Kekerasan*, 2025 <<https://ikhub.id/peta/43677958>>.

aksi massa yang spontan dan tidak terkendali. Akibatnya, sejumlah rumah ibadah seperti vihara dan kelenteng menjadi sasaran kemarahan massa, termasuk Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvara, dan beberapa kelenteng lainnya yang tersebar di Kecamatan Tanjung Balai Selatan .

Peristiwa tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada tempat ibadah, tetapi juga menimbulkan keretakan hubungan sosial di tengah masyarakat. Muncul rasa saling curiga antar kelompok etnis dan agama, serta terganggunya aktivitas ekonomi pasca kejadian. Untuk menjaga ketertiban, aparat keamanan seperti TNI dan Polri dikerahkan untuk menjaga setiap vihara dan kelenteng. Namun, keadaan mulai kondusif setelah berbagai pihak, baik dari pemerintah kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun aparat keamanan, bekerja sama memulihkan situasi.

Kini, Tanjungbalai tidak lagi dikenal sebagai kota intoleran. Pasca konflik 2016, berbagai upaya pemulihan dilakukan melalui dialog rutin, komunikasi terbuka, dan pertemuan antar tokoh agama dan masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa keberagaman harus dijaga dan dirawat bersama dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kerja sama yang solid dari semua pihak telah berhasil mengembalikan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih harmonis dan damai.³

FKUB terbentuk pada tahun 2006, berkeputusan Bersama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang terbatas pada setingkat kabupaten/kota.⁴ Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) memiliki peranan yang sangat penting dalam tugasnya untuk menjalankan tanggung jawab sebagai penjaga dan penjamin konkordinasi yang ketat di Indonesia⁵. FKUB bertugas untuk memfasilitasi

³ M H Nuzula, F Riza, and A F Desky, “Dampak Sosial Pasca Konflik 2016 Di Kota Tanjungbalai,” *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 41–57, <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/SEMAR/article/view/800%0A> <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/SEMAR/article/download/800/403>.

⁴ Susanto Polamolo and others, *Optimalisasi Peran Fkub Mewujudkan Indonesia Damai* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2018).

⁵ Riskon Ali Guru Harahap and Faridah, ‘Penerapan Fungsi Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kerukunan Dan Moderasi Beragama Di

dialog antar agama dan mendorong kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, agar FKUB dapat berfungsi secara efektif, dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategis. Dengan adanya *planning* yang tepat, FKUB bisa menyusun program-program yang tidak hanya mendorong kerukunan, tapi juga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati.

Kota Tanjung Balai memiliki potensi besar untuk dijadikan contoh dalam mewujudkan umat beragama yang harmonis melalui Planning FKUB yang baik. Hal ini tentunya mengajak semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, ormas, dan tokoh-tokoh agama untuk berkolaborasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perencanaan FKUB dapat dioptimalkan dalam menciptakan suasana beragama yang aman dan harmonis di Kota Tanjung Balai. Dengan gaya perencanaan yang partisipatif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan FKUB dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menjangkau pelaksanaan program, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya harmonisasi antar umat beragama. Pada Penelitian ini peneliti akan memaparkan lebih jelas hasil diskusi yang peneliti lakukan dengan FKUB tentang planning yang akan dilakukan oleh FKUB dalam melihat perancanaan kedepannya untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama di Kota Tanjung Balai.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengumpulan data secara langsung dengan metode studi kasus, yaitu sebuah metode yang memungkinkan peneliti menelusuri dan menjelaskan suatu peristiwa, kelompok, atau fenomena tertentu secara menyeluruh dan sistematis. Berbagai teknik digunakan untuk menggali informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan,

observasi partisipatif di lingkungan masyarakat dan rumah ibadah, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan bukti fisik lainnya. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap konteks peristiwa yang diteliti⁶. Selain itu, penelitian ini menelusuri latar belakang sosial keagamaan dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan bahasa untuk memahami makna simbolik dan kisah dakwah dalam masyarakat.

Dalam prosesnya, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam menggali dan memvalidasi data. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi sumber, metode, dan teori digunakan untuk memastikan keabsahan data; ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, memastikan kesesuaian dengan data lapangan dan mencocokkannya dengan teori yang relevan. Selain itu, semua hasil wawancara dan observasi didukung dengan dokumentasi tertulis guna memperkuat kredibilitas informasi yang diperoleh. Untuk memastikan ketepatan rujukan dan pengelolaan pustaka, peneliti juga menggunakan aplikasi Mendeley sebagai alat bantu dalam menyusun sitasi secara otomatis, sehingga semua referensi tersusun rapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Konflik Kota Tanjung Balai tahun 2016

Konflik sosial yang terjadi pada 29 Juli 2016 di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, merupakan salah satu peristiwa penting yang mencerminkan kompleksitas hubungan antarumat beragama dan dinamika sosial di masyarakat. Peristiwa ini diawali oleh keluhan seorang wanita etnis Tionghoa, Meliana, yang merasa terganggu oleh kerasnya suara adzan dari Masjid Al Maksum yang terletak di depan rumahnya. Meskipun masalah ini terkesan sederhana, konflik tersebut dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat setempat. Studi ini membatasi penelitian pada peristiwa dan dinamika yang terjadi

⁶ L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

sejak kejadian awal tahun 2016 hingga beberapa tahun setelah kerusuhan, sehingga fokus analisis berada dalam konteks waktu tersebut.

Masyarakat Kota Tanjung Balai, yang terdiri dari berbagai suku dan agama dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Indonesia mengalami goncangan, terlihat dari meningkatnya indeks kriminalitas dan semakin beragamnya jenis kejahatan yang terjadi. Peningkatan tingkat kriminalitas ini menunjukkan lemahnya kontrol institusional dari aparat penegak hukum, sekaligus mencerminkan ketidakberdayaan institusi dalam menjamin keamanan dan ketertiban. Dari sudut pandang kriminologis, kondisi ini mengindikasikan hancurnya pertahanan komunitas. Peningkatan angka kriminalitas juga dapat dipandang sebagai tanda munculnya disfungsi public security, yang menunjukkan ketidaksolidan dalam kerja sama masyarakat untuk membangun pertahanan kolektif melawan aksi kejahatan. Disfungsi tersebut seringkali terjadi karena masyarakat cenderung memandang bahwa menjaga stabilitas Kamtibmas hanya menjadi tanggung jawab Polri, sehingga mereka tidak peduli dengan kondisi keamanan di sekitarnya⁷.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai, H. Hajarul Aswadi, S.Pi, menjelaskan bahwa konflik ini muncul secara spontan tanpa adanya perencanaan atau keterlibatan aktor intelektual. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya dan mencerminkan ketegangan yang terkadang tersembunyi dalam masyarakat. Menurutnya, ketegangan ini berakar pada frustrasi sosial dan ekonomi, di mana kelompok etnis Tionghoa di kota tersebut dianggap lebih unggul dalam aspek ekonomi dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya.

⁷ Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, And Marzuki, "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, No. 1 (2022): 131–69, Https://Doi.Org/10.1007/978-981-19-2727-0_4.

Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjung Balai, Bapak Hasbullah, yang mengungkapkan bahwa kejadian tersebut lebih disebabkan oleh kesalahpahaman antara individu, dan tidak mencerminkan perasaan seluruh kelompok etnis atau agama tertentu. Bapak Hasbullah menyarankan pendekatan dialog dan komunikasi antara tokoh agama, pemerintah, dan kepolisian untuk menyelesaikan keributan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketegangan sosial ada, masih terdapat peluang untuk rekonsiliasi melalui kerja sama antar pihak terkait.

Perspektif yang serupa juga disampaikan oleh tokoh agama lainnya, seperti Bapak Js. Jolly (Ketua Majelis Agama Konghucu Kota Tanjung Balai) dan Bapak Si Thien Hok (Pengurus Harian Vihara Triatna Kota Tanjung Balai), yang menegaskan bahwa insiden tersebut adalah akibat tindakan individu dan bukan merupakan representasi dari kelompok agama atau etnis secara keseluruhan. Pendapat ini menunjukkan bahwa konflik ini lebih berkaitan dengan dinamika sosial yang mudah terdistorsi dan disalahpahami, terutama dalam konteks keberagaman agama dan etnis yang ada di Kota Tanjung Balai.

Secara keseluruhan, peristiwa kerusuhan ini menggambarkan betapa pentingnya membangun saling pengertian dan komunikasi antar kelompok dalam masyarakat yang pluralistik. Penyelesaian konflik semacam ini memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, pemerintah, dan aparat kepolisian, guna menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Sekretaris Kementerian Agama Kota Tanjung Balai, Bapak Abdurahim, konflik sosial yang terjadi pada tahun 2016 di Kota Tanjung Balai dipicu oleh pernyataan seorang perempuan keturunan Tionghoa yang dianggap menghina kumandang adzan. Kritik yang disampaikan secara emosional oleh perempuan tersebut memicu ketegangan di tengah masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan dan pembakaran sejumlah rumah ibadah. Umat Islam, khususnya, menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk penistaan terhadap agama.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Haris Tua Marpaung, seorang tokohagama dan Imam Masjid Al-Maksum, menjelaskan bahwa insiden bermula ketika seorang perempuan bernama Meliana mengeluhkan kerasnya suara adzan yang dikumandangkan dari Masjid Al-Maksum. Ia menyampaikan keluhannya secara langsung kepada nazir masjid, bahkan kepada seorang anak yang sedang membersihkan masjid, agar volume suara adzan dan bacaan Al-Qur'an diperkecil. Permintaan tersebut menyebabkan pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) memutuskan untuk menghentikan sementara penggunaan pengeras suara.

Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat sekitar yang merasa tidak lagi mendengar adzan seperti biasanya. Ketua BKM, Bapak Drs. Dailami, kemudian meminta klarifikasi dari Bapak Haris Tua Marpaung. Bersama masyarakat, beliau mendatangi kediaman perempuan tersebut untuk mencari penjelasan. Saat itu, anak dari perempuan tersebut membuka pintu dan menerima tamu dengan baik. Namun, tidak lama kemudian, perempuan yang bersangkutan keluar dan menyampaikan ketidaksenangannya terhadap suara adzan menggunakan bahasa Mandarin disertai ucapan yang dinilai kasar dan menyinggung keyakinan umat Islam.

Meningkatnya eskalasi verbal memicu ketegangan emosional masyarakat. Meskipun suami dari perempuan tersebut telah menyampaikan permohonan maaf, situasi semakin tidak terkendali. Perempuan tersebut kemudian dibawa ke kantor kelurahan untuk dimintai pertanggungjawaban, dan selanjutnya diamankan di Polsek Tanjung Balai guna menghindari tindakan anarkis dari massa.

Informasi mengenai dugaan penistaan agama dengan cepat menyebar di tengah masyarakat dan memicu aksi massa yang melibatkan sekelompok mahasiswa dan warga. Kerusuhan tersebut berdampak pada perusakan serta pembakaran rumah ibadah milik komunitas Tionghoa, termasuk penganut agama Buddha.

Pasca-kerusuhan, perempuan tersebut menuju Bapak Haris Tua Marpaung. Sebagai provokator utama dalam insiden tersebut. Namun, hasil pemeriksaan di Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa tuduhan tersebut

tidak terbukti. Penyidikan aparat kepolisian menyimpulkan bahwa akar permasalahan terletak pada pernyataan awal yang dilontarkan oleh perempuan tersebut, bukan pada tindakan tokoh agama setempat. Aparat juga mencatat bahwa komunitas Tionghoa lainnya tidak merasa terganggu oleh kumandang adzan, sehingga kasus ini dipandang sebagai tindakan personal, bukan representasi kelompok. Akhirnya, perempuan tersebut dikenakan sanksi hukum atas dugaan penistaan agama.

Berdasarkan wawancara dengan mantan Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Waris Tholib, terkait insiden pembakaran rumah ibadah Vihara di kota Tanjung Balai, diketahui bahwa penggerak utama kerusuhan tersebut adalah sejumlah mahasiswa atau oknum mahasiswa yang bertindak sebagai provokator. Mereka mempengaruhi masyarakat setempat untuk melakukan aksi pembakaran rumah ibadah tersebut. Saat ditanya oleh beberapa mahasiswa dan wartawan mengenai siapa yang harus disalahkan atas kejadian tersebut, Bapak Waris Tholib menyatakan bahwa tidak ada pihak yang harus disalahkan secara langsung. Namun, jika ada pihak yang perlu bertanggung jawab, maka hal itu terutama berkaitan dengan kelambanan aparat, kepala lingkungan (kepling), lurah, dan camat dalam menangani kerusuhan tersebut. Beliau menilai bahwa jika pihak berwenang segera turun tangan untuk menenangkan situasi, kejadian tersebut bisa saja tidak berkembang menjadi kerusuhan yang berujung pada pembakaran rumah ibadah.

Analisis Penyebab dan Penanganan Insiden Kerusuhan di Tanjung Balai

Bapak Waris Tholib menjelaskan bahwa peristiwa kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai berawal dari adanya kesalahpahaman dan luapan emosi masyarakat, yang dipicu oleh isu dugaan penghinaan terhadap agama Islam. Dugaan tersebut dikaitkan dengan seorang individu dari etnis Tionghoa, yang kemudian menyulut ketegangan di tengah masyarakat. Isu ini menimbulkan reaksi emosional dari sebagian warga yang merasa agamanya telah dilecehkan, sehingga memicu eskalasi konflik.

Namun demikian, Bapak Waris Tholib menekankan bahwa insiden ini seharusnya dapat dicegah atau diminimalisir apabila aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan mampu merespons dengan cepat dan

tepat sejak awal kemunculan isu tersebut. Menurutnya, tindakan preventif dari aparatur pemerintah lokal sangat krusial dalam meredam situasi sebelum berkembang menjadi tindakan anarkis seperti pembakaran.

Pernyataan ini menyoroti pentingnya peran responsif dan koordinatif dari struktur pemerintahan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik komunal. Pencegahan dini melalui komunikasi yang efektif, klarifikasi informasi, serta mediasi antar pihak yang berselisih merupakan langkah strategis untuk meredam potensi kerusuhan di masyarakat yang majemuk.

Upaya Promosi Kerukunan Umat Beragama

Selama masa kepemimpinannya, Bapak Waris Tholib telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempromosikan kerukunan antarumat beragama melalui pelaksanaan program moderasi beragama. Salah satu inisiatif unggulannya adalah pengembangan kawasan wisata religi yang dirancang untuk mengakomodasi keberadaan enam rumah ibadah dari enam agama yang berbeda. Rumah-rumah ibadah tersebut mencakup Vihara Konghucu, Vihara Buddha, Masjid Terapung, Gereja, dan Kuil. Seluruh tempat ibadah ini dibangun dalam satu kawasan terpadu yang terletak di tepi sungai di ujung wilayah Tanjung.

Program ini bertujuan untuk menciptakan ruang interaksi yang harmonis antarumat beragama serta menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampak positif dari program ini terlihat jelas pada tahun 2019, ketika Kota Tanjung Balai secara resmi tidak lagi dikategorikan sebagai kota yang intoleran. Hal ini menjadi indikator keberhasilan dalam membangun toleransi dan kohesi sosial antar pemeluk agama yang berbeda.

Selain itu, Bapak Waris Tholib secara konsisten menunjukkan sikap inklusif sebagai pemimpin daerah. Ia senantiasa menghadiri kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas agama, sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman keyakinan yang ada di masyarakat. Tindakan ini mencerminkan sikap kepemimpinan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap agama manapun.

Beliau juga menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dalam pemberian bantuan kepada seluruh rumah ibadah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah diarahkan secara proporsional dan merata kepada masjid, gereja, vihara, serta tempat ibadah lainnya, tanpa memandang perbedaan agama. Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah secara layak.

Bapak Waris Tholib juga mengingatkan bahwa selama kepemimpinannya, beliau selalu menghadiri acara yang diselenggarakan oleh komunitas agama apapun sebagai bentuk penghargaan terhadap perbedaan agama. Hal ini menunjukkan sikap adilnya sebagai pemimpin yang tidak membedakan agama satu dengan lainnya. Beliau juga menekankan bahwa bantuan harus diberikan secara merata kepada semua rumah ibadah, baik masjid, gereja, vihara, maupun rumah ibadah lainnya. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dalam memperlakukan semua umat beragama di Tanjung Balai.

Melihat masalah yang terjadi FKUB selaku forum yang sangat berpengaruh mengenai kerukunan dan keagamaan umat beragama sebagai wadah yang secara teoritis memiliki dua fungsi yaitu representative and aspiratif. Oleh karena itu, peran FKUB sangat besar dalam memberikan perencanaan-perencanaan yang mana bertujuan untuk memberikan kedamaian dan ketertiban antara umat beragama di kota tanjungbalai pertimbangan penganggotaan forum kerukunan umat beragama ada pada nilai kearifan, kematangan, kepribadian, kepemimpinan, dan keteladanan. Ini menjadikan anggota forum kerukunan umat beragama menjadi sosok berpengaruh memiliki suara yang bisa dipandang masyarakat terutama ketika bisa mendamaikan setiap perselisihan yang terjadi mengenai kerukunan.⁸

⁸ Rina Atriana, ‘Baca Artikel Detiknews, “Ini Data 10 Rumah Ibadah Yang Dibakar Saat Bentrok Warga Di Tanjungbalai” Selengkapnya [Https://News.Detik.Com/Berita/d-3264873/Ini-Data-10-Rumah-Ibadah-Yang-Dibakar-Saat-Bentrok-Warga-Di-Tanjungbalai.](https://News.Detik.Com/Berita/d-3264873/Ini-Data-10-Rumah-Ibadah-Yang-Dibakar-Saat-Bentrok-Warga-Di-Tanjungbalai.)’, *Detiknews*, 2015 <<https://news.detik.com/berita/d-3264873/ini-data-10-rumah-ibadah-yang-dibakar-saat-bentrok-warga-di-tanjungbalai>>.

FKUB menunjukkan kepemimpinan yang mencerminkan karakteristik kepemimpinan transformasional, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melalui visi yang kuat dan karismatik.⁹ Menurut Harsoyo, juga menegaskan bahwa pemimpin transformasional adalah mereka yang dapat memperluas dan meningkatkan kepedulian pengikutnya dengan memberi orang tahu tentang tujuan dan misi organisasi dan mendorong mereka untuk bertindak melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan kolektif.¹⁰ Dalam hal ini, para tokoh FKUB berusaha mendorong masyarakat untuk mempertahankan keutuhan sosial dengan mendorong semangat kebersamaan daripada kepentingan pribadi atau sectoral.¹¹

Pola kepemimpinan partisipatif juga terlihat dari keterlibatan aktif tokoh agama oleh FKUB bersama pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Jenis kepemimpinan ini menekankan kolaborasi dalam pengambilan keputusan antara pemimpin dan anggota, dengan mempertimbangkan moralitas, kepercayaan, dan motivasi kolektif.¹² Gary Yukl menambahkan bahwa kepemimpinan partisipatif melibatkan upaya aktif seorang pemimpin untuk mendorong dan memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk berpartisipasi. Ini ditunjukkan oleh FKUB dengan membuka ruang untuk diskusi lintas agama dan etnis dan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi dilakukan dari bawah ke atas,

⁹ Qoyyimun Nafal, Binti Maunah, and Achmad Paton, 'Hakikat Kepemimpinan Transformasional Kepemimpinan', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.3 (2019), pp. 75–83 <<https://www.kompasiana.com/idrisapandi/58fb8125349373880b4c289e/hakikat-kepemimpinan>>.

¹⁰ Roni Harsoyo, 'Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam', *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3.2 (2022), pp. 247–62, doi:10.21154/sajiem.v3i2.112.

¹¹ Chatherine Melinda, 'Kesesuaian Gaya Kepemimpian Dengan Karakteristik Generasi Milenial : Literature Review', *YUME : Journal of Management*, 7.2 (2024), pp. 767–75, doi:<https://doi.org/10.37531/yum.v7i2.6797>.

¹² Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, 'Pesantren Efektif: Studi Gaya Kepemimpinan Partisipatif', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3.1 (2022), pp. 1–12, doi:10.31538/munaddhomah.v3i1.159.

melainkan dari partisipasi dan kesadaran kolektif dari semua bagian Masyarakat.¹³

Planning FKUB dalam mewujudkan kerukunan ummat beragama

Kota Tanjung Balai dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi prinsip moderasi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Untuk mendukung iklim toleransi tersebut, Pemerintah Kota Tanjung Balai membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah komunikasi antarumat beragama yang didirikan oleh masyarakat lintas agama dan disahkan secara formal oleh pemerintah. FKUB didirikan pada tingkat kota sampai ke tingkat kecamatan sebagai sebuah media untuk berkomunikasi antar umat beragama. Kehadiran FKUB merupakan upaya untuk memfasilitasi komunikasi yang mengarah pada keharmonisasian dan dinamisasi pembangunan hubungan internal umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pihak lainnya.

Dalam konteks manajemen, upaya FKUB dalam merawat harmoni sosial dapat dilihat dari aspek perencanaan strategis yang mereka susun. Mengacu pada pandangan George R. Terry¹⁴, perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta serta memperkirakan kondisi di masa depan untuk merumuskan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini tidak hanya membutuhkan penetapan arah, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepastian, ketidakpastian, dan risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan.¹⁵

Berdasarkan prinsip tersebut, Pemerintah Daerah, MUI, Departemen Agama, dan FKUB Kota Tanjung Balai melakukan beberapa langkah sebagai upaya untuk melakukan komunikasi antar umat beragama yang di antaranya: 1) Meningkatkan konsolidasi, dialog kemitraan secara lebih intensif baik interen maupun antar umat beragama dan pemuka agama sesuai dengan kondisi daerah Kota Tanjung Balai. 2) Meningkatkan koordinasi, konsultasi secara periodik dengan Pemerintah Daerah Kota

¹³ Gary Yukl, *Leadership in Organizations* (Pearson Education, 2019).

¹⁴ George R. Tarry, *Dasar Dasar Manajemen Edisi Revisi* (Bumi Aksara, 2019).

¹⁵ Silmi Nizamuddin, Bambang Kurniawan, and Muhammad SUbhan, 'Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen. Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis', *Journal of Student Research (JSR)*, 2.1 (2024), pp. 106–20.

Tanjung Balai, Departemen Agama Tanjung Balai, Majelis Ulama Indonesia, maupun intansi terkait lainnya termasuk pemuka agama. 3) Meningkatkan peran dan pemberdayaan program Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tanjung Balai. 4) Membuat sosialisasi antar umat beragama setiap bulan nya dan didukung oleh pemerintah kota tanjung balai. 5) FKUB bertugas untuk memfasilitasi dialog antar agama dan mendorong kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan.

Kerukunan ummat beragama di Kota Tanjung Balai

Dalam pengertian sehari-hari, kata "rukun" dan "kerukunan" sering dipahami sebagai keadaan damai dan perdamaian. Kedua istilah ini menggambarkan suasana yang harmonis dan tanpa konflik, yang merupakan hal yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan lebih sering digunakan dalam konteks pergaulan antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Kerukunan antar umat beragama, pada dasarnya, merupakan sebuah sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan antara orang-orang yang berbeda agama atau golongan umat beragama dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, kerukunan berperan penting dalam menciptakan keharmonisan di tengah perbedaan yang ada, baik itu dalam agama, suku, maupun budaya.

Pentingnya kerukunan antar umat beragama pertama kali disuarakan oleh Menteri Agama K.H. Muhammad Dahlan dalam pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1967. Dalam pidatonya, K.H. Muhammad Dahlan menekankan bahwa kerukunan antar golongan beragama adalah syarat utama bagi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia yang saat itu berada dalam masa transisi setelah kemerdekaan. Ia mengungkapkan bahwa, "Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mulak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMERA." Dengan kata lain, kerukunan antar umat beragama bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kedamaian sosial, tetapi juga sebagai dasar bagi terciptanya kestabilan dalam pemerintahan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, K.H. Muhammad Dahlan berharap

adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kondisi yang adil dan makmur, yang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dari pidato K.H. Muhammad Dahlan tersebut, istilah "kerukunan hidup beragama" mulai diperkenalkan dan selanjutnya menjadi istilah yang baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah ini mencerminkan pentingnya kerukunan antar umat beragama sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan politik negara, yang menjunjung tinggi prinsip pluralisme dan kebhinnekaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, istilah "kerukunan" diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan "kesatuan hati" dan "bersepakat" untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Makna yang terkandung dalam istilah ini menunjukkan pentingnya rasa saling menghormati, kerja sama, dan toleransi antar individu dan kelompok, yang semuanya berperan dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan.

Kerukunan, dengan demikian, bukan sekadar konsep normatif, tetapi juga merupakan nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang rukun adalah masyarakat yang mampu hidup berdampingan meskipun terdapat perbedaan pandangan, latar belakang, dan keyakinan. Dalam konteks kerukunan umat beragama, hal ini berarti bahwa meskipun setiap individu atau kelompok memiliki keyakinan agama yang berbeda, mereka tetap bisa saling menghargai dan hidup bersama dalam kedamaian. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat pluralistik, dengan keberagaman agama, suku, dan budaya yang melimpah.

Kerukunan dalam hidup beragama juga memiliki peran penting dalam menjaga solidaritas antar masyarakat. Ketika umat beragama bisa hidup rukun, terciptalah ikatan sosial yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Solidaritas yang terbentuk dari kerukunan ini juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan keadilan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu untuk

menjaga dan memeliharanya. Dengan demikian, kerukunan menjadi landasan penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan damai, sebagaimana yang diharapkan oleh K.H. M. Dachlan dan tercermin dalam berbagai kebijakan negara¹⁶.

Pendapat dari Tiga tokoh agama (masyarakat non islam) tentang kerukunan beragama di Kota Tanjung Balai

Menurut Nyonya Simatupang Boru Siagian, sebagai tokoh agama Kristen, kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjung Balai sangat terjaga dengan baik. Setiap kali diselenggarakan acara di rumah beliau, ibadah dilakukan sesuai dengan keyakinan agama Kristen dalam suasana yang damai, tanpa adanya kata-kata intoleransi terhadap agama lain. Di Kota Tanjung Balai, toleransi beragama selalu menjadi perhatian penting bagi para pemuka agama, yang secara konsisten mengingatkan masyarakat akan pentingnya sikap saling menghormati. Beliau juga menegaskan bahwa persatuan yang kuat di Kota Tanjung Balai merupakan faktor utama terciptanya kedamaian dan keharmonisan, tanpa adanya konflik. Selain itu, beliau mengapresiasi peran pemerintah yang tidak membedakan perlakuan terhadap umat beragama. Harapan beliau adalah agar kerukunan ini terus dipertahankan, sehingga Kota Tanjung Balai tetap aman, damai, dan bebas dari kericuhan atau konflik agama.

Menurut Koh Apuy, sebagai umat Konghucu, beliau menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjung Balai berjalan dengan aman dan damai. Beliau menyatakan bahwa tidak ada masalah besar terkait kerukunan agama dan toleransi antar umat beragama di kota ini masih sangat kuat. Namun, beliau juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah terjadi beberapa kesalahpahaman yang disebabkan oleh tindakan oknum tertentu, yang sempat mengganggu keharmonisan dalam hubungan antar agama. Koh Apuy menekankan bahwa agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan kerukunan, tetapi sejauh mana agama itu dihargai dan dipraktikkan bergantung pada keyakinan masing-masing

¹⁶ Ibnu Rusydi and Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian', *Journal for Islamic Studies*, 1.1 (2018), pp. 170–81, doi:10.5281/zenodo.1161580.

individu. Saat ditanya tentang kegiatan agama Konghucu, Koh Apuy menjelaskan bahwa aktivitas keagamaan mereka meliputi ibadah dan pelaksanaan adat-istiadat, seperti perayaan ulang tahun, di mana pemuka agama selalu mengingatkan pentingnya hidup dalam toleransi beragama. Menurutnya, dengan menjaga sikap toleransi, kita dapat menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Terakhir, beliau menekankan bahwa hidup rukun membawa kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Hidup dalam masyarakat yang harmonis, tanpa memandang ras, suku, atau agama, menjadikan kehidupan sosial lebih menyenangkan dan aman.

Menurut Bapak Denny Baldish, seorang tokoh agama Hindu sekaligus anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungbalai, kondisi kerukunan umat beragama di Tanjungbalai tergolong sangat baik. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya program pemerintah mengenai moderasi beragama yang mendorong terciptanya kehidupan beragama yang harmonis. Berkat program tersebut, berbagai kegiatan keagamaan di kota ini dapat berjalan secara kondusif dan lancar.

Salah satu bentuk nyata dari keharmonisan antarumat beragama di Tanjungbalai dapat dilihat dari inisiatif pengembangan wisata religi yang mengintegrasikan lima rumah ibadah dari agama yang berbeda. Lokasi wisata ini terletak di Jalan Asahan, Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara para pengusaha keturunan Tionghoa dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai, di bawah dukungan aktif dari FKUB setempat.

Menariknya, pembangunan lima rumah ibadah ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pemerintah Kota. Seluruh biaya pembangunan ditanggung langsung oleh para pengusaha Tionghoa sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap keharmonisan sosial dan keagamaan. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat semangat toleransi beragama, tetapi juga menegaskan identitas Tanjungbalai sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman.

Dengan demikian, wisata religi ini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata semata. Kawasan itu jadi simbol nyata toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat multicultural. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungbalai mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi dan perdamaian di tengah keberagaman agama dan budaya. Hal ini disampaikan oleh Ketua FKUB Kota Tanjungbalai, Hasbullah, dalam rangka memperingati Hari Persaudaraan yang diperingati beberapa hari yang lalu.

Menurut Hasbullah, toleransi dan perdamaian adalah kunci untuk menjaga keharmonisan masyarakat."Kita satu kebangsaan, yaitu Bangsa Indonesia. Untuk itulah mari kita jaga dengan cara saling hormat menghormati antara agama dengan agama yang lain," kata Hasbullah, Kamis (6/2/2025). FKUB Kota Tanjungbalai telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap keragaman agama. Salah satunya kegiatan sosialisasi. Sebagai mana Apa yang telah dijalankan oleh FKUB sejalan dengan Visi dan misi FKUB yang telah terealisasikan secara umum.

"1) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama; 2) Meningkatkan wawasan multikultural dan moderasi beragama; 3) Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan, toleransi, dan keharmonisan; 4) Mengoptimalkan peran serta umat beragama dalam mewujudkan kerukunan Mencegah tindakan yang dapat mengganggu kerukunan umat, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; 5) Meningkatkan peranan dan fungsi FKUB sebagai wadah musyawarah dan konsultasi pemuka agama; 6) Mendorong peran pemerintah dan swasta dalam mewujudkan kerukunan umat beragama".

"Kita telah melaksanakan sosialisasi kerukunan umat beragama, dan juga kegiatan keagamaan lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap keragaman agama, serta mencegah konflik dan menjaga keharmonisan masyarakat," ujar Hasbullah. Hasbullah juga mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih bahwa persaudaraan antara umat beragama di Kota Tanjungbalai sangat baik. "Kita ada enam agama di sini, dan persaudaraannya cukup baik, saling mendukung dan membantu. Kita juga saling kunjung-mengunjungi dan memberikan rasa bahagia maupun duka," ucapnya mengakhiri.

Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Islam

Islam menempatkan toleransi sebagai bagian penting dalam ajaran kehidupan sosial. Toleransi dalam Islam tercermin dari sikap saling menghormati dan memahami perbedaan yang ada di tengah masyarakat, baik dalam hal suku, warna kulit, budaya, bahasa, maupun agama. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari ketetapan Allah sebagai bentuk keberagaman yang harus diterima dan dijaga. Dalam istilah Islam, toleransi dikenal dengan sebutan *tasamuh*, yang menggambarkan sikap terbuka, saling menghargai, dan menjaga harmoni tanpa mencampuri ranah keyakinan dan ibadah orang lain.

Meski Islam mengajarkan toleransi, bukan berarti seorang Muslim harus mengakui kebenaran ajaran agama lain dalam aspek akidah. Islam memisahkan secara tegas antara toleransi dalam kehidupan sosial dan keyakinan agama. Toleransi tidak berarti menyamakan semua agama atau membenarkan tata cara ibadah agama lain, melainkan menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Dalam hal akidah, seorang Muslim tetap harus menjaga kemurnian imannya, karena hanya Islam yang diakui sebagai agama yang benar di sisi Allah.

Oleh karena itu, sikap toleran dalam Islam bukanlah toleransi yang kebablasan, melainkan toleransi yang proporsional dan berdasarkan pada batas-batas yang jelas. Islam mengakui bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat keberagaman keyakinan, namun hal itu tidak boleh menjadikan umat Islam larut dalam praktik ibadah agama lain. Toleransi yang diajarkan Islam hanya berlaku dalam ranah sosial kemasyarakatan, seperti hidup berdampingan secara damai, bekerja sama dalam kebaikan, dan menghormati hak-hak antarumat beragama, tanpa harus mencampuradukkan ajaran dan ritual keagamaan.

Sebagai upaya menjaga kerukunan antarumat beragama, dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penting dipahami bahwa FKUB bukanlah lembaga yang dibentuk pemerintah secara sepahak, melainkan wadah yang tumbuh dari masyarakat dengan dukungan fasilitasi dari pemerintah. Keberadaan FKUB menegaskan bahwa umat beragama adalah pelaku utama dalam menjaga keharmonisan, bukan sekadar

penerima kebijakan. Melalui forum ini, masyarakat lintas agama didorong untuk aktif berpartisipasi dalam membina persatuan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

“Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi allah orang yang bertakwa. Sungguh allah maha mengetahui”. (Q.S. Al- Hujurat [4]: 13)¹⁷

Dari ayat di atas penulis dapat menyimpulkan sedikit bahwa yang di tekankan ialah lita’ arofuh saling mengenal atau menjalani hubungan tanpa memandang agamanya, sukunya dan rasnya. Kalau kita memandang agamanya pasti kita akan menjadi fanatik karena merasa agama kita yang paling benar menganggap agama lain itu salah, dan di ayat ini pula mengajarkan supaya tidak melihat kesenjangan sosial walaupun kita tidak satu keyakinan tapi kita di ikat dengan bineka tunggal ika, apabila semua agama memahami ini pasti tidak terjadi konflik antara agama karena sudah terjalin kebaikan antara agama satu dengan agama lainnya. Dan tidak pula berlebihan pasti ada juga batasan seperti ketika beribadah., dalam ibadah tidak ada kata toleransi, kalau dalam hal lain bisa saja bertoleransi atau bekerja sama, seperti muamala, politik, sosial dan lainnya¹⁸.

Program Program FKUB Kota Tanjung Balai

Berikut adalah beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Tanjungbalai.

“1) FKUB Tanjungbalai aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya toleransi dan perdamaian di tengah keberagaman agama dan budaya; 2) FKUB berperan sebagai mediator dan penengah dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama; 3) FKUB bekerjasama dengan tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang lebih dinamis tentang kerukunan beragama; 4) FKUB mendorong kegiatan keagamaan yang melibatkan berbagai agama untuk membangun rasa persaudaraan dan kebersamaan; 6) FKUB juga menyelenggarakan study wawasan kerukunan untuk

¹⁷ RI Kemenag, ‘Terjemahan Al-Quran’ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

¹⁸ Fitriani Fitriani and Khoirul Azhar Siregar, ‘Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Asia Mega Mas’, *Studia Sosia Religia*, 4.2 (2021), p. 12, doi:10.51900/ssr.v4i2.11062.

memperdalam pemahaman tentang kerukunan umat beragama; 7) FKUB melakukan sosialisasi kepada para penyuluh agama se-kota Tanjungbalai untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan fungsi FKUB; 8) FKUB melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai untuk membahas isu-isu terkait kerukunan beragama dan penanganan potensi konflik”.

FKUB Tanjungbalai juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program-programnya. Dengan berbagai kegiatan dan program ini, FKUB Tanjungbalai berharap dapat terus menjaga kerukunan dan kondusifitas di tengah masyarakat yang heterogen.

D. PENUTUP

Planning FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Tanjung Balai menunjukkan peran strategis forum ini sebagai wadah komunikasi dan mediasi antarumat beragama. Perencanaan yang sistematis meliputi konsolidasi dialog kemitraan, koordinasi dengan pihak pemerintah dan tokoh agama, serta sosialisasi nilai-nilai toleransi telah berhasil mentransformasi Tanjung Balai dari kota yang pernah mengalami konflik keagamaan menjadi model kerukunan umat beragama. Keberhasilan planning FKUB terlihat dari terwujudnya kawasan wisata religi yang mengintegrasikan enam rumah ibadah berbeda agama dalam satu kawasan, menggambarkan harmonisasi keberagaman yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, FKUB telah menciptakan ruang dialog yang memungkinkan penyelesaian konflik secara damai dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kerukunan dalam masyarakat yang plural. Keberhasilan ini diperkuat oleh gaya kepemimpinan Bapak Waris Tholib yang inklusif dan moderatif, serta dukungan dari tokoh lintas agama dan komunitas etnis, termasuk kontribusi pengusaha Tionghoa. Pendekatan kolaboratif FKUB yang melibatkan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi contoh baik bagaimana pluralitas dapat dikelola secara konstruktif. Dengan demikian, pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan moderasi, keadilan, kesetaraan, serta sinergi lintas sektor telah berkontribusi nyata dalam memperkuat kohesi sosial dan

memperbaiki citra keberagamaan di Tanjung Balai. Model kolaboratif ini dapat dijadikan contoh praktik baik dalam pembangunan masyarakat multikultural yang damai dan toleran di Indonesia.

Adapun saran bagi FKUB, penting untuk menjaga kesinambungan program dengan memperkuat kapasitas anggota, memperluas jejaring antar daerah, serta mendokumentasikan praktik baik sebagai bahan edukasi publik. Sementara itu, untuk peneliti selanjutnya, kajian dapat diperluas pada analisis manajemen konflik berbasis masyarakat sipil atau mengeksplorasi model kepemimpinan kolaboratif antar lembaga dalam konteks kota multikultural lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Atriana, Rina, 'Baca Artikel Detiknews, "Ini Data 10 Rumah Ibadah Yang Dibakar Saat Bentrok Warga Di Tanjungbalai" Selengkapnya <Https://News.Detik.Com/Berita/D-3264873/Ini-Data-10-Rumah-Ibadah-Yang-Dibakar-Saat-Bentrok-Warga-Di-Tanjungbalai.>', *Detiknews*, 2015 <<Https://News.Detik.Com/Berita/D-3264873/Ini-Data-10-Rumah-Ibadah-Yang-Dibakar-Saat-Bentrok-Warga-Di-Tanjungbalai>>

Fitriani, Fitriani, And Khoirul Azhar Siregar, 'Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Asia Mega Mas', *Studia Sosia Religia*, 4.2 (2021), P. 12, Doi:10.51900/Ssr.V4i2.11062

Harahap, Riskon Ali Guru, And Faridah, 'Penerapan Fungsi Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kerukunan Dan Moderasi Beragama Di Kota Medan', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jmpis)*, 5.3 (2024), Pp. 138–48, Doi:<Https://Doi.Org/10.38035/Jmpis.V5i3>

Ikhub, 'Sekilas Sumatera Utara', *I-Khub Bnpt On Ct/Ve - Pusat Informasi Dan Kolaborasi Penanggulangan Terorisme Dan Ekstremisme Kekerasan*, 2025 <<Https://Ikhub.Id/Peta/43677958>>

Kemenag, Ri, 'Terjemahan Al-Quran' (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)

Mahadi, Ujang, *Komunikasi Antarbudaya (1st Ed.)* (Pustaka Pelajar, 2017)

Melinda, Chatherine, 'Kesesuaian Gaya Kepemimpinan Dengan Karakteristik Generasi Milenial : Literature Review', *Yume : Journal Of Management*, 7.2 (2024), Pp. 767–75, Doi:<Https://Doi.Org/10.37531/Yum.V7i2.6797>

Moleong, L. J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Pt. Remaja Rosdakarya, 2017)

Nafal, Qoyyimun, Binti Maunah, And Achmad Paton, 'Hakikat Kepemimpinan Transformasional Kepemimpinan', *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.3 (2019), Pp. 75–83 <<Https://Www.Kompasiana.Com/Idrisapandi/58fb8125349373880b4c289e/Hakikat-Kepemimpinan>>

Nizamuddin, Silmi, Bambang Kurniawan, And Muhammad Subhan, 'Perencanaan Dalam Ilmu Pengantar Manajemen. Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis', *Journal Of Student Research (Jsr)*, 2.1 (2024), Pp. 106–20

Nuzula, M H, F Riza, And A F Desky, 'Dampak Sosial Pasca Konflik 2016 Di Kota Tanjungbalai', *Semar: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2.2 (2024), Pp. 41–57
<Https://Jurnal.Kalimasadagroup.Com/Index.Php/Semar/Article/View/800%oahttps://Jurnal.Kalimasadagroup.Com/Index.Php/Semar/Article/Download/800/403>

Polamolo, Susanto, Arini Robbi Izzati, Kamil Alfi Arifin, Heronimus Heron, Mahrus Ali, Kelik Sugiarto, And Others, *Optimalisasi Peran Fkub Mewujudkan Indonesia Damai* (Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham Uii), 2018)

Prasetyo, Muhammad Anggung Manumanoso, 'Pesantren Efektif: Studi Gaya Kepemimpinan Partisipatif', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3.1 (2022), Pp. 1–12, Doi:10.31538/Munaddhomah.V3i1.159

Ramadhan, Rinaldi, Mahmud Mulyadi, And Marzuki, 'Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.1 (2022), Pp. 131–69, Doi:10.1007/978-981-19-2727-0_4

Roni Harsoyo, 'Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M. Bass Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam', *Southeast Asian Journal Of Islamic Education Management*, 3.2 (2022), Pp. 247–62, Doi:10.21154/Sajiem.V3i2.112

Rusydi, Ibnu, And Siti Zolehah, 'Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian', *Journal For Islamic Studies*, 1.1 (2018), Pp. 170–81, Doi:10.5281/Zenodo.1161580

Tarry, George R., *Dasar Dasar Manajemen Edisi Revisi* (Bumi Aksara, 2019)

Yukl, Gary, *Leadership In Organizations* (Pearson Education, 2019)

